

**ZAKAT DAN KEDERMAWANAN SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PERLINDUNGAN SOSIAL SELAMA PANDEMI: ULASAN LITERATUR
SISTEMATIK**

***SYSTEMIC LITERATURE REVIWE: ZAKAT AND GENEROSITY AS A FORM OF PUBLIC
PARTICIPATION IN SOCIAL PROTECTION DURING PANDEMIC***

Saddam Rasanjani

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Tanoh Abee, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, 23111, Indonesia
Email: saddam.rasanjani@unsyiah.ac.id

Dahlawi

Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Syiah Kuala
Jl. Tgk. Tanoh Abee, Kopelma Darussalam, Kota Banda Aceh, 23111, Indonesia
Email: dahlawi@unsyiah.ac.id

Abstrak

Serangan COVID-19 telah memperlambat akselerasi ekonomi di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Perubahan ekonomi yang dramatis jelas mempengaruhi kinerja negara, terutama dalam mengatasi kemiskinan. Pembatasan mobilitas masyarakat oleh pemerintah untuk menekan penyebaran COVID-19 secara tidak langsung telah menciptakan angka kemiskinan baru. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan penekanan pada Systematic Literature Review melalui pengumpulan data sekunder. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana partisipasi masyarakat dalam membantu pemerintah dalam menangani permasalahan sosial dan ekonomi yang diakibatkan oleh COVID-19. Temuan penelitian ini adalah, selama masa pandemi, pemerintah masih dan akan terus mengandalkan program perlindungan sosial dalam menangani COVID-19. Selain perlindungan sosial, Indonesia yang dikenal sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim, memiliki instrumen keagamaan yaitu Zakat yang juga berfungsi untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat merupakan instrumen yang potensial untuk mendukung pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan, asalkan dapat dikelola dengan baik. Selain itu, masyarakat Indonesia juga dikenal dengan tingkat kedermawanannya yang tinggi, sehingga ketika pemerintah belum menyentuh masyarakat dengan bantuan sosialnya, akan selalu ada kelompok masyarakat lain yang berinisiatif untuk mulai saling membantu. COVID-19 menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dengan kedermawanan melalui instrumen keagamaan seperti zakat, maupun non-keagamaan telah mampu menciptakan pola perlindungan sosial yang dapat meringankan kewajiban pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah harus lebih mengoptimalkan lagi potensi yang dimiliki oleh zakat melalui kolaborasi lintas sektor demi memperkuat program perlindungan sosial.

Kata Kunci: COVID-19, kedermawanan, partisipasi masyarakat, perlindungan social, zakat.

Abstract

The attack of COVID-19 has slowed economic acceleration in many countries, including Indonesia. Dramatic economic changes affect the country's performance, especially in overcoming poverty. The government's restrictions on community mobility to suppress the spread of COVID-19 have indirectly created a new poverty rate. This research is qualitative, emphasizing Systematic Literature Review through secondary data collection. The researcher aims to analyze the extent of public participation in helping the government deal with social and economic problems caused by COVID-19. The study found that during the pandemic, the

government still and will continue to rely on social protection programs in dealing with COVID-19. In addition to social protection, Indonesia, which is known as one of the countries with massive Muslim population, has a religious instrument called zakat which also serves to alleviate poverty. Zakat is believed to be a potential instrument to support the government in tackling poverty as long as it is well managed. In addition, the Indonesian people are also known for their high level of generosity. When the government has not touched the community with its social assistance, there will always be other community groups who take the initiative to start helping each other. COVID-19 has shown that public participation with generosity through religious instruments such as zakat and non-religious ones has been able to create a pattern of social protection that can ease the government's obligations. Therefore, the government must optimize the potential of zakat and public generosity through cross-sectoral cooperation to strengthen social protection programs.

Keywords: COVID-19; generosity; public participation; social protection; zakat.

PENDAHULUAN

Terjalnya arus yang dibawa oleh virus corona telah mampu melumpuhkan berbagai aktivitas negara. Krisis tersebut diyakini telah menimbulkan berbagai gejolak sosial dan ekonomi yang memprihatinkan (Lawton et al., 2020), di mana hal tersebut telah dirasakan oleh segenap masyarakat baik regional maupun global. Pemerintah bereaksi dengan membatasi mobilitas dan interaksi masyarakat, dengan harapan mampu menekan jumlah masyarakat yang terinfeksi (Rassanjani et al., 2022; Ulfa & Safirussalim, 2021).

Di satu sisi, kebijakan menjaga jarak yang diberlakukan oleh pemerintah telah berhasil melindungi nyawa masyarakat (Newbold et al., 2020), seperti yang terlihat pada sejumlah wilayah di mana terdapat tren positif dalam penurunan kasus baru dari komunitas yang terinfeksi dengan adanya pembatasan sosial (Wong et al., 2020). Namun, di sisi lain, peraturan preventif ini sayangnya mengakibatkan sejumlah kegiatan perekonomian menjadi terhenti (Al-Mansour & Al-Ajmi, 2020); dengan begitu, pandemi akhirnya membunuh siklus ekonomi, mengakibatkan pemutusan kerja sementara dan bahkan pemutusan kerja permanen sebagai kondisi terburuk yang dihasilkan (Carlsson-Szlezak et al., 2020). Akibatnya, mereka yang kehilangan sumber pendapatannya akibat

kebijakan penanganan COVID-19 harus rela terjatuh ke dalam sebuah lingkaran kemiskinan yang baru (Rassanjani et al., 2021).

Gupta et al. (2021) melihat sejumlah kebijakan penanganan COVID-19 di Sub-Sahara Afrika dan Asia Selatan malah memperburuk program pengentasan kemiskinan setempat, dan malah akan membahayakan pencapaian salah satu tujuan dari pembangunan berkelanjutan yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan sebelum 2030. Ancaman COVID-19 terhadap kemiskinan tidak main-main, dua negara dengan rezim kesejahteraan liberal seperti Amerika Serikat dan Kanada juga dibuat khawatir olehnya, sehingga kedua negara tersebut menjadikan pengurangan kemiskinan sebagai isu utama dalam agenda kebijakan (Béland et al., 2022). Ganasnya COVID-19 tidak mengenal istilah negara maju maupun negara berkembang, dikarenakan pandemi COVID-19 ini mampu menghadirkan teror kemiskinan terhadap negara manapun.

Kehadiran negara yang kadangkala terlambat dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak tertutupi oleh uluran tangan kelompok masyarakat dermawan yang siap siaga di tengah keadaan genting. Selain itu, nilai-nilai religiusitas juga ikut membentuk kesadaran masyarakat untuk menunaikan sebuah kewajiban keagamaan yang

bernama Zakat (Mujaddid & Ramadan, 2019). Instrumen yang satu ini telah lama menjadi alat pengentasan kemiskinan di kalangan Muslim (Razak, 2020). Dengan begitu, tidak peduli seberat apapun pandemi yang menerjang, partisipasi masyarakat akan terus tumbuh dalam membantu pemerintah di bidang perlindungan sosial.

Sejumlah penelitian sebelumnya mencoba untuk menjelaskan bagaimana peranan penting zakat dalam pemerataan ekonomi dan usaha pengentasan kemiskinan di era COVID-19 (Amanda et al., 2021; Kadir et al., 2020; Mujib & Nurvianti, 2022), namun semuanya berfokus pada bagaimana upaya memaksimalkan pengumpulan dananya dan bagaimana peran dari amil zakat dalam mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat miskin yang terdampak oleh COVID-19. Sedangkan penulis lebih fokus pada bagaimana partisipasi masyarakat dalam menguatkan program perlindungan sosial yang bisa diwujudkan melalui tingkat kedermawanan dan penyaluran zakat oleh masyarakat kepada lembaga amil zakat.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin melihat sejauh mana partisipasi masyarakat dapat membantu pemerintah ketika menghadapi kondisi darurat dan tidak terkendali? Pandemi COVID-19 misalnya, mengingat rasa empati terhadap sesama selama pandemi justru meningkat di tengah kecemasan terhadap situasi yang tidak menentu. Harapannya, tulisan ini dapat memberikan gambaran terkait dengan sumber keuangan alternatif yang bisa menjadi tumpuan selain keberadaan program perlindungan sosial yang telah lama menjadi andalan pemerintah dalam menanggulangi masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat.

Untuk menjawab hal tersebut, penulis menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR), yaitu suatu rangkaian penelitian yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan. Fokus SLR adalah menemukan berbagai teori, prinsip, atau ide yang digunakan untuk menganalisis dan memecahkan pertanyaan penelitian yang dirumuskan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu penguraian secara teratur terhadap data yang telah diperoleh, kemudian diberikan pengertian dan penjelasan agar pembaca dapat memahaminya dengan baik. Objek penelitian digali melalui berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, surat kabar, majalah, dan dokumen lainnya. Jurnal ilmiah sepenuhnya diambil melalui bantuan mesin pencarian *Google Scholar* dengan menggunakan beberapa kata kunci utama, yaitu: COVID-19, kemiskinan, perlindungan sosial, partisipasi masyarakat, dan zakat; sehingga rujukan yang berhasil dihimpun mayoritas adalah publikasi yang sangat *up to date* yaitu hanya terbitan tahun 2020 dan 2021.

PEMBAHASAN

Penelitian literatur atau tinjauan pustaka berupaya mempelajari atau mengkaji secara kritis pengetahuan, ide, atau temuan yang terkandung dalam kumpulan literatur yang berorientasi akademis dan merumuskan kontribusi teoretis dan metodologis untuk topik tersebut.

Penelitian ini mengkategorikan hasil penelusuran ilmiah kedalam empat kajian, yaitu: COVID-19 dan kemiskinan; COVID-19 dan perlindungan sosial; COVID-19 dan partisipasi masyarakat; COVID-19 dan zakat. Untuk lebih lengkapnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Table 1. Gambaran Penelitian

Topik/kajian	Penulis/peneliti	Hasil dan pembahasan
COVID-19 dan Kemiskinan	Power et al. (2020)	Jutaan rumah tangga sudah berada dalam kemiskinan jauh sebelum pandemi hadir
	Gibson & Olivia (2020)	Terindikasi 26,2 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan sebelum COVID-19
	Blustein et al. (2020)	Kehilangan pekerjaan akibat COVID-19 akan mempengaruhi kehidupan sosial karena perubahan situasi keuangan
	Jafino et al. (2020)	Sekitar 32 hingga 132 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 karena perubahan iklim; hasil prakiraan ini juga sesuai dengan perkiraan yang tersedia untuk peningkatan kemiskinan global akibat COVID-19
	Ali & Tiwari (2020)	Diprediksi pandemi membuat 5,5 hingga 8 juta orang Indonesia jatuh miskin
COVID-19 dan Perlindungan Sosial	Gerard (2020)	Negara-negara berkembang dapat memberikan perlindungan sosial yang luas daripada negara-negara berpenghasilan tinggi; strategi ini dapat mencakup; memperluas sistem jaminan sosial, memperluas program bantuan sosial yang ada, dan melibatkan pemerintah daerah dan lembaga non-negara
	Hajad et al. (2021)	Pemerintahan daerah juga telah membangun inisiatif dengan menjadikan program perlindungan sosial sebagai langkah konkrit dalam menyelamatkan warga dari ancaman COVID-19
COVID-19 dan Partisipasi Masyarakat	Lotti (2020)	Selama periode COVID-19 yang menghasilkan turbulensi ekonomi membuat individu malah menjadi lebih murah hati, sejumlah donasi terus mengalir demi membantu sesama
	Marston et al. (2020)	Partisipasi bersama di bawah tekanan pandemi COVID-19 sebenarnya merupakan sebuah tantangan dan risiko, namun dinilai sebagai suatu hal yang krusial dan berkelanjutan
	Moon (2020)	Korea Selatan ternyata mampu mengelola ketahanannya terhadap COVID-19 salah satunya dikarenakan partisipasi warga negara yang sangat kooperatif

COVID-19 dan Zakat	Miao et al. (2021)	Untuk menciptakan sebuah langkah yang efektif, kinerja pemerintah selama pandemi yang menimbulkan krisis perlu didukung oleh aktor lain, seperti warga negara, masyarakat sipil termasuk komunitas dan organisasi non-pemerintah, dan mitra jaringan lainnya
	Alam (2020)	Di Bangladesh, zakat merupakan sistem darurat jangka pendek yang efektif dan telah berhasil mengurangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat rentan
	Ezziti (2020)	Di Maroko, percepatan pembayaran zakat dilakukan untuk membantu mereka yang terdampak pandemi
	Swandaru & Mohsin (2022)	Sejumlah negara mayoritas muslim telah menyalurkan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendukung layanan kesehatan darurat, menopang kegiatan pendidikan, memulihkan dampak ekonomi dan mempertahankan program dakwah
	Hudaefi & Beik (2021)	Penghimpunan zakat selama pandemi di Indonesia justru menunjukkan peningkatan
	Umar & Abubakar (2021)	Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap zakat disinyalir sebagai alasan utama meningkatnya pengumpulan zakat dalam periode COVID-19
	Maghfirah (2021)	Jika mampu dikelola dengan lebih optimal, zakat tidak hanya sekedar menjadi bantuan jangka pendek, namun, bisa lebih dari yang diperkirakan.

Pandemi dan Ancaman Kemiskinan

Fakta di lapangan menyebutkan bahwa Indonesia adalah salah satu negara dengan kasus terkonfirmasi COVID-19 tertinggi di dunia, terutama di negara kawasan ASEAN (Abdullah et al., 2021). Ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk mengekang pandemi diakibatkan lemahnya kapasitas negara terlihat dari komunikasi dan pengambilan kebijakan awal yang buruk, pada saat itu elit lebih mementingkan diri sendiri dan gagal memahami

besarnya pandemi yang sebenarnya (Nugroho & Syarief, 2021). Tingginya persentase infeksi dan penyebaran COVID-19 di Indonesia tentu mempengaruhi sejumlah program dan kebijakan, sekaligus menjadi awal peningkatan jumlah kelompok miskin dan rentan.

Indonesia telah lama bergelut dengan masalah kesejahteraan, dan tentu saja, upaya panjang yang telah dilakukan oleh negara ini dalam mengurangi kemiskinan kini sedang diuji, dikarenakan pandemi COVID-19 yang berpotensi melahirkan jumlah orang miskin

baru. Terindikasi 26,2 juta orang hidup di bawah garis kemiskinan sebelum COVID-19 (Gibson & Olivia, 2020). Diprediksi pandemi membuat 5,5 hingga 8 juta orang Indonesia jatuh miskin (Ali & Tiwari, 2020). Tanpa kehadiran COVID-19, bayang-bayang kemiskinan cukup tinggi, dan tidak bisa dibayangkan betapa terjal jalan panjang untuk menurunkan angka kemiskinan yang fantastis tersebut, mengingat resesi ekonomi yang sudah pasti terjadi.

Masalah pengangguran akut telah terjadi di sejumlah negara berkembang, khususnya di Indonesia (Suci & Ramdanyah, 2019). Masalah tersebut telah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah sejak lama, kini dengan ditambah kondisi pandemi maka ikut menambah kompleksitas permasalahan pada sistem ketenagakerjaan di negeri ini. Dan jika tidak ditangani dengan baik, dikhawatirkan peningkatan angka pengangguran tersebut akan menciptakan banyak kemungkinan buruk bagi para korban. Hiswåls et al. (2017) mengungkapkan bahwa kehilangan pekerjaan mempengaruhi kehidupan sosial dan pola konsumsi korban karena perubahan situasi keuangan; mereka bahkan merasa terisolasi, kehilangan harga diri, dan berputus asa, yang pada akhirnya mempengaruhi kesehatan fisik mereka.

Lebih lanjut, Blustein et al. (2020) mengungkapkan bahwa kehilangan pekerjaan akan mempengaruhi kehidupan sosial dan pola konsumsi korban karena perubahan situasi keuangan. Sedangkan akibat terburuk dari penanganan yang tidak tepat dari masalah sosial ini adalah mengakibatkan lonjakan kemiskinan yang sulit dikendalikan. Celakanya, COVID-19 mungkin akan menjadi penyebab pertama meningkatnya kemiskinan global secara drastis sejak krisis moneter 1998. Dengan menggunakan ribuan skenario, Jafino et al. (2020) memperkirakan bahwa 32 juta hingga 132 juta orang akan jatuh ke dalam kemiskinan

ekstrem pada tahun 2030 karena perubahan iklim; hasil prakiraan ini juga sesuai dengan perkiraan yang tersedia untuk peningkatan kemiskinan global akibat COVID-19.

Dengan tidak adanya lapangan kerja dan meningkatnya kemiskinan, muncul masalah multidimensi yang tidak kalah signifikan, yaitu kelaparan. Kemiskinan dan kelaparan saling berkaitan erat, karena kelaparan muncul akibat dari kemiskinan (Rassanjani et al., 2021). Untuk menjawab masalah kelaparan, salah satu program pengentasan kemiskinan yang dirancang adalah penyediaan kebutuhan makanan pokok (Sakanko & David, 2018). Namun, jika tidak ditangani dengan baik, kelaparan yang berkepanjangan dapat menimbulkan masalah yang lebih serius, yaitu anarkisme atau kriminalitas. Penelitian sebelumnya telah mengamati bahwa kemiskinan dan kejahatan saling terkait. Papaioannou (2017) menganggap bahwa guncangan pendapatan menyebabkan kemiskinan yang meluas, yang kemudian menjadi penyebab utama kejahatan. Namun, Iyer and Topalova (2014) menyatakan bahwa kemiskinan absolut dikaitkan dengan tingkat kejahatan yang lebih tinggi daripada kemiskinan relatif, dan ini juga ditegaskan oleh kaum Marxis, yang melihat deprivasi absolut sebagai akar kejahatan (Kim et al., 2020). Dengan demikian, durasi pandemi akan mempengaruhi potensi kejahatan yang muncul, tetapi harus diingat bahwa kejahatan akan menjadi pilihan terakhir jika tidak ada cara lain untuk memenuhi kebutuhan. Oleh karena itu, agar niat buruk ini mudah dihentikan, diperlukan peran, upaya, dan kebijakan pemerintah, yang diharapkan mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi kehidupan di tengah pandemi yang berkepanjangan ini.

Power et al. (2020) menyatakan bahwa jutaan rumah tangga sudah berada dalam kemiskinan jauh sebelum pandemi hadir. Kini, jutaan lagi berpotensi mengikuti kecuali

pemerintah terus melindungi pendapatan rumah tangga dengan membuat penyesuaian kebijakan. Dengan begitu, pemerintah akan terlihat oleh publik, meski ada keterlambatan dalam menentukan arah kebijakan. Jauh sebelum COVID-19 melanda dan menghancurkan ketahanan sosial, pemerintah telah mengarahkan kebijakan perlindungan sosial sebagai instrumen pengentasan kemiskinan. Sistem perlindungan sosial telah muncul sebagai alat kebijakan tambahan untuk mengatasi kemiskinan dan kelaparan di negara-negara berkembang dalam 20 tahun terakhir (Hidrobo et al., 2018). Perlindungan sosial telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang paling populer dalam mengatasi kemiskinan (Rassanjani et al., 2019). Dengan demikian, kebijakan perlindungan sosial memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerataan jaminan sosial bagi semua pihak, yaitu dengan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan serta mendorong pertumbuhan yang inklusif melalui peningkatan produktivitas sumber daya manusia dan transformasi struktural perekonomian nasional.

The World Bank (2020) dalam laporannya, menyebutkan bahwa terdapat sekitar 106 negara yang telah memperkenalkan program perlindungan sosial dalam menanggapi wabah COVID-19; jumlah ini meningkat 26% dari jumlah sebelumnya (hanya 84 negara). Dari angka tersebut dapat dilihat bahwa sebagian besar negara masih mengandalkan perlindungan sosial sebagai solusi atau kebijakan dalam mengatasi dampak besar yang ditimbulkan oleh COVID-19. Pemerintah Indonesia telah merespons pandemi dengan menghabiskan sejumlah alokasi anggaran melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), fokus kebijakan pemulihan ekonomi nasional tersebut diharapkan dapat meminimalkan jumlah kelompok rentan yang terdampak akibat COVID-19. Bahkan di level lokal, kepala daerah juga telah membangun inisiatif dengan

menjadikan program perlindungan sosial sebagai langkah konkrit dalam menyelamatkan warga dari ancaman COVID-19 (Hajad et al., 2021).

Sebagai bagian terbesar dari paket pemulihan, perlindungan sosial diharapkan dapat membantu kelompok masyarakat miskin saat ini dan mencegah individu yang rentan jatuh ke dalam lubang kemiskinan akibat serangan COVID-19. Namun, meskipun perlindungan sosial memiliki proporsi yang besar, perlu digarisbawahi bahwa besaran alokasi anggaran yang selama ini dianggarkan masih jauh dari kondisi ideal (Sparrow et al., 2020). Rassanjani et al. (2021) berpendapat bahwa mewujudkan perlindungan sosial bukanlah masalah yang sulit bagi negara-negara dengan Produk Domestik Bruto per kapita yang besar, dikarenakan kemampuan anggarannya yang sangat dinamis. Namun, di sisi lain, skema perlindungan sosial cukup memberatkan negara-negara dengan Produk Domestik Bruto rendah, ditambah lagi Produk Domestik Bruto mereka ikut menurun karena aktivitas ekonomi yang melambat selama pandemi. Kondisi tersebut juga telah dijelaskan jauh sebelumnya oleh Harris (2013) yang menilai sistem perlindungan sosial yang efektif telah lama dilihat sebagai kemewahan yang sulit dijangkau oleh banyak negara berkembang dan berpenghasilan rendah.

Tantangan lain dari distribusi perlindungan sosial adalah ketepatan sasaran penerima manfaat yang sering dipertanyakan akibat masalah *database* yang urung selesai, tidak sedikit masyarakat miskin layak namun tidak menerima manfaat dan tidak sedikit pula masyarakat kategori mampu malah menjadi penerima. Olivia et al. (2020) menyatakan bahwa alasan utama penerima manfaat program tidak mencapai sasaran dikarenakan basis data terpadu tidak diperbarui secara berkala, selain itu juga di dalam pedoman program tidak mengizinkan rumah tangga untuk mengajukan

permohonan. Disisi lain, Andriana & Jowono (2021) melihat program bantuan yang diselenggarakan pemerintah selama pandemi belum berorientasi pada *multilevel governance* secara penuh, sehingga menyebabkan distribusi tidak maksimal. Selain itu, program perlindungan sosial tidak memiliki desain yang tepat sasaran karena hanya dirancang untuk memerangi kemiskinan sebelum pandemi, artinya hanya berfokus pada orang miskin di pedesaan dan tidak mengelola rumah tangga perkotaan sebagai mayoritas yang terkena dampak pandemi (Sparrow et al., 2020). Dalam kompleksitas alokasi perlindungan sosial, permasalahan tersebut bisa dimengerti, mengingat terlalu banyak hal yang harus dipikirkan pemerintah dalam menganggarkan pendapatannya untuk penanganan COVID-19, seperti penyediaan fasilitas kesehatan yang lebih baik, perlindungan sosial bagi masyarakat terdampak, dan lain sebagainya.

Pandemi COVID-19 telah mengungkap sejumlah kerentanan besar yang dialami umat manusia, terutama ketidakmampuan dalam mencegah sebuah guncangan yang besar dan seketika. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa besarnya tantangan yang ada telah melebihi kapasitas negara dan pemerintah selaku pihak yang bertanggung jawab atas masyarakat yang berada di bawah perlindungan yuridiksinya. Villa et al. (2020) menyatakan bahwa mulanya setiap negara telah memberikan responnya masing-masing terhadap ancaman COVID-19, namun tanggapan tersebut tidak berakhir efektif, sehingga sebagian besar otoritas kesehatan gagal memahami ancaman COVID-19 yang berakhir buruk. Di sisi lain, tidak seperti kebanyakan negara, Korea Selatan ternyata mampu mengelola ketahanannya terhadap COVID-19 melalui pendekatan yang adaptif dan tangkas, transparansi kebijakan, dan yang tidak kalah penting adalah partisipasi warga negara yang sangat kooperatif (Moon,

2020). Dengan begitu, keberhasilan pertempuran melawan pandemi akan sangat bergantung pada kapasitas pemerintah dan masyarakatnya untuk saling belajar dan berkomitmen terhadap masalah yang dihadapi.

Terlepas dari kesulitan ekonomi yang meluas, ada curahan kemurahan hati yang menonjol selama COVID-19. Lotti (2020) menyatakan bahwa selama periode isolasi yang menghasilkan turbulensi ekonomi membuat individu malah menjadi lebih murah hati, sejumlah donasi terus mengalir demi membantu sesama. Lebih lanjut, memberi atau bersedekah bagi yang membutuhkan adalah hal yang lumrah di kehidupan sehari-hari, namun, hal yang luar biasanya adalah dana yang terkumpul untuk bantuan COVID-19 ternyata jauh melebihi dana bencana sebelumnya. Grabois (2020) mencatat terkait respon filantropi global terhadap pandemi COVID-19 yang ternyata telah melampaui \$10 miliar (USD) dalam beberapa bulan pertama, angka tersebut lebih dari dua kali lipat untuk seluruh kampanye donasi bagi 9/11, krisis keuangan 2008, Badai Harvey, wabah Ebola, gempa bumi Haiti, dan kebakaran hutan Australia. Kedermawanan yang meningkat selama COVID-19 menunjukkan bagaimana pandemi telah memicu dorongan untuk membantu sesama, di mana pengakuan terhadap ikatan sosial merupakan salah satu motivasi kedermawanan tersebut berasal. Dan seperti virus itu sendiri, kebaikan juga hal yang dapat menular. Dari sini dapat diartikan bahwasanya sebuah kedermawanan yang terbentuk merupakan gagasan di mana orang dapat meniru perilaku baik dari komunitas sekitar mereka.

Dalam konteks pandemi, sisi lain yang bisa dilihat selain permasalahan sosial yang kompleks adalah ketika semakin banyak orang berkumpul dalam semangat solidaritas untuk saling mendukung demi melindungi individu-individu yang paling rentan di komunitas mereka maupun di luar komunitasnya, baik

saling kenal dekat hingga tidak kenal sama sekali. Partisipasi bersama di bawah tekanan pandemi COVID-19 sebenarnya merupakan sebuah tantangan dan risiko, namun dinilai sebagai suatu hal yang krusial dan berkelanjutan (Marston et al., 2020). Sejumlah kisah inspiratif telah muncul tentang tetangga membantu tetangga, kemudian juga ada komunitas tertentu yang melakukan berbagai kegiatan seperti mengumpulkan bahan makanan, menyediakan masker, pembersih tangan, dan obat-obatan, ataupun berbagi informasi, menawarkan dukungan emosional, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah apakah gerakan sukarelawan tersebut akan bubar setelah krisis berakhir, atau hal tersebut akan menjadi sebuah fenomena jangka panjang dan berkelanjutan?

Beberapa pihak berpendapat bahwa upaya spontan dan terorganisir yang dilakukan oleh para relawan dermawan tersebut berfungsi untuk mengimbangi kegagalan atau keterlambatan negara untuk menyediakan fungsi kesejahteraan selama pandemi. Miao et al. (2021) berpendapat bahwa untuk menciptakan sebuah langkah yang efektif, kinerja pemerintah selama krisis perlu didukung oleh aktor lain, seperti warga negara, masyarakat sipil termasuk komunitas dan organisasi non-pemerintah, dan mitra jaringan lainnya. Sementara itu, bagi kelompok masyarakat tersebut tentu menyadari bahwa kegiatan yang mereka lakukan hanya sebatas respon krisis jangka pendek, namun, tidak bisa dipungkiri bahwa bantuan yang mereka upayakan tersebut dapat menjadi langkah awal menuju perubahan yang transformatif. Oleh karena itu, respons masyarakat sipil terhadap pemecahan masalah lokal akan terus dibutuhkan daripada sebelumnya untuk menumbuhkan kembali peduli dan rasa kebersamaan di era COVID-19 hingga masa-masa setelahnya.

Sebagai negara dengan salah satu populasi terbesar di dunia, dan mayoritas

penduduk beragama Muslim, Negara Indonesia sebenarnya cukup beruntung. Terdapat sebuah tatanan yang telah menjadi tradisi panjang dalam umat Islam yang berupaya meningkatkan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu melalui pengumpulan zakat, dan instrumen ini merupakan kewajiban agama bagi semua umat Islam yang memiliki kekayaan berlebih untuk membantu mereka yang membutuhkan. Zakat memiliki fungsi perlindungan sosial dengan menyasar masyarakat yang rentan terhadap risiko kemiskinan (Rusydia & As-Salafiyah, 2021). Selain itu, zakat juga memiliki peran khusus untuk meningkatkan pembangunan dalam ekonomi transisi (Shaukat & Zhu, 2021).

Swandaru & Mohsin (2022) secara spesifik mengkaji tentang peran zakat dalam merespon pandemi COVID-19. Temuannya menyebutkan bahwa sejumlah negara mayoritas muslim telah menyalurkan zakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, mendukung layanan kesehatan darurat, menopang kegiatan pendidikan, memulihkan dampak ekonomi, dan mempertahankan program dakwah. Dari temuan tersebut, dapat ditarik sebuah benang merah bahwa pentingnya keberadaan zakat yang akan memberikan sebuah pola pemenuhan kebutuhan sosio-ekonomi yang signifikan karena dampaknya yang memungkinkan lahirnya inisiatif baru dalam mencapai pemberdayaan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan rekayasa ulang sosial di masyarakat (Mahadi et al., 2021). Lebih lanjut, kelebihan utama zakat yang tidak dimiliki oleh instrumen ekonomi Islam lainnya adalah kekuatan landasan pendanaan yang kokoh (Shaikh, 2016). Jika mampu dikelola dengan lebih optimal, zakat tidak hanya sekedar menjadi bantuan jangka pendek, bahkan bisa lebih dari yang selama ini diperkirakan (Maghfirah, 2021). Oleh karena itu, berdasarkan tujuan dan manfaatnya, zakat diyakini memiliki sumber dana yang berkelanjutan sehingga dapat

menjadi sumber pendanaan alternatif bagi program pengentasan kemiskinan dan pembangunan.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar di bidang zakat. Beberapa penelitian tentang potensi zakat telah dilakukan, salah satunya datang dari Asfarina et al. (2019), yang menyatakan bahwa potensi zakat Indonesia bernilai lebih dari Rp 200 triliun. Selanjutnya, hasil kajian dari lembaga non struktural pemerintah yang mengelola zakat secara nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional atau biasa disingkat dengan BAZNAS juga mendapat nilai serupa, yakni sekitar Rp 17 miliar hingga Rp 200 triliun (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2020). Dengan potensi besar yang dimiliki tersebut, misi pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi sebenarnya akan lebih mudah diwujudkan, tentunya dengan tidak melupakan segala dinamika dan hambatan yang akan terus ada dalam menghalangi jalan panjang pengentasan kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, kondisi ini bergantung pada pemerintah untuk membangun kolaborasi yang kuat dengan pihak luar seperti organisasi keagamaan, bahwa membangun kemitraan yang strategis sangat penting dalam misi pembangunan.

Kompleksitas COVID-19 sebagai ancaman baru di era yang serba cepat ini membutuhkan perhatian lebih pada studi administrasi publik, khususnya kebijakan publik, dan tata kelola kolaboratif perlu dilakukan untuk menciptakan kebijakan yang tidak hanya cepat namun juga tepat (Huang, 2020). Beberapa paket kebijakan pemerintah untuk memulihkan kondisi ekonomi yang tidak menentu untuk mencegah munculnya kelompok miskin baru harus ditempuh bahkan dalam keadaan darurat. Gerard et al. (2020) berpendapat bahwa negara-negara berkembang dapat memberikan perlindungan sosial yang luas

jika mereka menggunakan solusi tambal sulam yang lebih luas daripada negara-negara berpenghasilan tinggi; strategi ini dapat mencakup; memperluas sistem jaminan sosial, memperluas program bantuan sosial yang ada, dan melibatkan pemerintah daerah dan lembaga non-negara. Optimalisasi Zakat sebagai sumber dana berkelanjutan menjadi salah satu strategi tambal sulam yang dimaksud, dan inisiasi ini telah dilakukan beberapa negara di masa pandemi COVID-19.

Di Maroko misalnya, percepatan pembayaran Zakat dilakukan untuk membantu mereka yang terdampak pandemi (Ezziti, 2020). Sementara itu, di Bangladesh, Zakat merupakan sistem darurat jangka pendek yang efektif yang telah berhasil mengurangi dampak COVID-19 terhadap masyarakat rentan (Alam, 2020). Lebih lanjut, Hudaefi & Beik (2021) menemukan bahwa penghimpunan zakat selama pandemi di Indonesia justru menunjukkan peningkatan. Padahal selama ini zakat dengan dinamikanya sering mengalami permasalahan terkait dengan pengumpulan dan penyalurannya (Dahlawi et al., 2021). Meningkatnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat terhadap zakat disinyalir sebagai alasan utama meningkatnya pengumpulan zakat dalam periode COVID-19 (Umar & Abubakar, 2021).

Anomali positif yang terjadi terkait dengan lonjakan pengumpulan dana zakat selama masa pandemi adalah hal yang sangat luar biasa, mengingat keinginan untuk berbuat baik dan membantu sesama tetap menjadi hal utama di tengah kecemasan individual yang tinggi. Di tengah ketidakmampuan negara untuk pulih dari bencana, kerentanan akibat pandemi yang erat kaitannya dengan kemiskinan dapat diatasi dengan hadirnya zakat. Oleh karena itu, peningkatan distribusi kekayaan dan pemberian asuransi dengan mengoptimalkan dana zakat perlu menjadi perhatian pemerintah untuk meminimalisir kerugian dan meningkatkan

ketahanan akibat COVID-19 yang sulit dipahami kapan akan berakhir.

PENUTUP

Wabah COVID-19 telah membawa tantangan baru bagi semua negara di dunia, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia. Pembatasan mobilitas selama pandemi yang diharapkan mampu mengendalikan penyebaran COVID-19 ternyata di sisi lainnya justru berdampak pada perlambatan ekonomi dan peningkatan jumlah pemutusan kerja; dengan demikian, laju kemiskinan semakin tidak dapat dikendalikan. Meningkatnya jumlah kelompok miskin dan rentan akibat COVID-19 lebih rumit dalam hal kompleksitas masalah kemiskinan di era-era sebelumnya. Dengan begitu, pemerintah harus memperluas program jaminan sosial dan bantuan sosial dengan cara memperkuat kolaborasi di antara otoritas lokal dan lembaga non-negara, dan tidak lupa juga memaksimalkan partisipasi masyarakat.

Selain perlindungan sosial, Indonesia juga harus mengoptimalkan zakat. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, zakat sebagai instrumen keagamaan yang kokoh akan mampu mendukung pemerintah dalam membantu mereka yang membutuhkan. Mengelola zakat dengan baik akan menjadi alat yang baik untuk melengkapi kebutuhan sosial bagi kelompok miskin dan rentan. Oleh karena itu, COVID-19 diyakini akan memiliki konsekuensi jangka panjang bagi keadaan kemiskinan global yang ekstrem. Namun, terlepas dari dampak negatif COVID-19 yang dianggap telah mengganggu pembangunan, ternyata di sisi lain situasi saat ini merupakan momen atau peluang transformatif yang dapat mengubah dunia menjadi lebih baik lewat partisipasi masyarakat. Selanjutnya, banyak hal akan berubah menjadi lebih baik, seperti pembangunan ekonomi yang akan lebih

berkelanjutan. Semoga COVID-19 segera berlalu, dan apa yang dicita-citakan umat manusia untuk hidup sejahtera dapat terwujud

UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, D., Susilo, S., Ahmar, A. S., Rusli, R., & Hidayat, R. (2021). The Application of K-Means Clustering for Province Clustering in Indonesia of the Risk of the COVID-19 Pandemic Based on COVID-19 Data. *Quality & Quantity*. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01176-w>
- Al-Mansour, J. F., & Al-Ajmi, S. A. (2020). Coronavirus 'COVID-19'-Supply Chain Disruption and Implications for Strategy, Economy, and Management. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 7(9), 659–672. <https://doi.org/10.13106/JAFEB.2020.VO L7.NO9.659>
- Alam, T. M. (2020). Role of Islamic Finance during COVID-19: A Study on Practical Implication of Zakat as Short-term Emergency Support System. *EJIF – European Journal of Islamic Finance*, 16, 1–6. <https://doi.org/10.13135/2421-2172/4581>
- Ali, R., & Tiwari, S. (2020). *Indonesia Covid-19 Observatory: Ex-ante Poverty & Distributional Impacts of COVID-19 in Indonesia*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34738>
- Amanda, G. R., Malihah, F., Indriyastuti, S., Khumairah, N., Tulasmi, T., & Mukti, T. (2021). Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 216–222. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1789>
- Andriyana, A., & Jowono, V. (2021). Analisis Implementasi Program Bantuan Sosial Penanganan Pandemi COVID-19 di

- Indonesia Menggunakan Perspektif Multilevel Governance. *Sosio Informa*, 7(3), 186–202. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2663>
- Asfarina, M., Ascarya, A., & Beik, I. S. (2019). Classical and Contemporary Fiqh Approaches to Re-Estimating the Zakat Potential in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 5(2), 387–418. <https://doi.org/10.21098/jimf.v5i2.1068>
- Béland, D., Dinan, S., Rocco, P., & Waddan, A. (2022). COVID-19, Poverty Reduction, and Partisanship in Canada and the United States. *Policy and Society*, 0(00), 1–15. <https://doi.org/10.1093/polsoc/puac002>
- Blustein, D. L., Duffy, R., Ferreira, J. A., Cohen-Scali, V., Cinamon, R. G., & Allan, B. A. (2020). Unemployment in the time of COVID-19: A Research Agenda. *Journal of Vocational Behavior*, 119, 103436. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2020.103436>
- Carlsson-Szlezak, P., Reeves, M., & Swartz, P. (2020). What Coronavirus Could Mean for the Global Economy. *Harvard Business Review*, 3(March), 1–10. <https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy>
- Dahlawi, D., Rasanjani, S., & Herizal, H. (2021). Zakat as a Local Revenue in Aceh : A Dynamics of Policy Implementation in the Local Realm. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 19(2), 200–217. <https://doi.org/10.30984/jis.v19i2.1659>
- Ezziti, B.-E. (2020). Zakat as Means of Social Welfare: Exploring a Recent Fatwa from the Moroccan 'Ulama 'on the Permissibility of Paying Zakat in Advance to Help the Poor of the COVID-19. *AZKA International Journal of Zakat & Social Finance*, 1(1), 94–101. <https://doi.org/10.51377/azjaf.vol1no01.12>
- Gerard, F., Imbert, C., & Orkin, K. (2020). Social Protection Response to the COVID-19 Crisis: Options for Developing Countries. *Oxford Review of Economic Policy*, 36(April), S281–S296. <https://doi.org/10.1093/oxrep/graa026>
- Gibson, J., & Olivia, S. (2020). Direct and Indirect Effects of COVID-19 on Life Expectancy and Poverty in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 325–344. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1847244>
- Grabois, A. (2020). *Philanthropy's Response to COVID-19 now more than \$10 Billion Worldwide*. <https://blog.candid.org/post/philanthropys-response-to-covid-19-now-more-than-10-billion-worldwide/>
- Gupta, J., Bavinck, M., Ros-Tonen, M., Asubonteng, K., Bosch, H., van Ewijk, E., Hordijk, M., Van Leynseele, Y., Lopes Cardozo, M., Miedema, E., Pouw, N., Rammelt, C., Scholtens, J., Vegelin, C., & Verrest, H. (2021). COVID-19, Poverty and Inclusive Development. *World Development*, 145, 105527. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105527>
- Hajad, V., Ikhsan, I., & Marefanda, N. (2021). *Jaring Pengaman Sosial: Analisis Anggaran Penanganan COVID-19 di Aceh*. 2(2), 126–139. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.23688>
- Harris, E. (2013). Financing Social Protection Floors: Considerations of Fiscal Space. *International Social Security Review*, 66(3–4), 111–143. <https://doi.org/10.1111/issr.12021>
- Hidrobo, M., Hoddinott, J., Kumar, N., & Olivier, M. (2018). Social Protection, Food Security, and Asset Formation. *World Development*, 101, 88–103. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.08.014>
- Hiswåls, A. S., Marttila, A., Målstam, E., & Macassa, G. (2017). Experiences of Unemployment and Well-Being after Job Loss during Economic Recession: Results of a Qualitative Study in East Central Sweden. *Journal of Public Health Research*, 6(3), 135–141. <https://doi.org/10.4081/jphr.2017.995>
- Huang, I. Y.-F. (2020). Fighting COVID-19 through Government Initiatives and Collaborative Governance: The Taiwan Experience. *Public Administration Review*,

- 80(4), 665–670.
<https://doi.org/10.1111/puar.13239>
- Hudaefi, F. A., & Beik, I. S. (2021). Digital Zakāh Campaign in time of COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Netnographic Study. *Journal of Islamic Marketing*, 12(3), 498–517. <https://doi.org/10.1108/JIMA-09-2020-0299>
- Iyer, L., & Topalova, P. B. (2014). Poverty and Crime: Evidence from Rainfall and Trade Shocks in India. In *Harvard Business Working Paper No 14-067*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.2419522>
- Jafino, B. A., Walsh, B., Rozenberg, J., & Hallegatte, S. (2020). *Revised Estimates of the Impact of Climate Change on Extreme Poverty by 2030* (Issue September). <http://www.worldbank.org/prwp>.
- Kadir, A., Hakim, M. R., Syam, F., & Karim, M. S. (2020). Penggunaan Dana Zakat Pada Korban COVID-19 Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law*, 1(2), 107–116. <https://doi.org/10.33096/al-tafaqquh.v1i2.61>
- Kim, B., Seo, C., & Hong, Y.-O. (2020). A Systematic Review and Meta-analysis of Income Inequality and Crime in Europe: Do Places Matter? *European Journal on Criminal Policy and Research*. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09450-7>
- Lawton, T. C., Dorobantu, S., Rajwani, T. S., & Sun, P. (2020). The Implications of COVID-19 for Nonmarket Strategy Research. *Journal of Management Studies*, 57(8), 1732–1736. <https://doi.org/10.1111/joms.12627>
- Lotti, L. (2020). Generosity During COVID-19 the Effect of Social Distancing and Framing on Donations in Dictator Games. *Munich Personal RePEc Archive*, 102690, 1–29.
- Maghfirah, M. (2021). Efektivitas Pengelolaan Zakat Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Sosio Informa*, 7(3), 203–218. <https://doi.org/10.33007/inf.v7i3.2571>
- Mahadi, N. F., Zain, N. R. M., & Othman, A. H. A. (2021). The Role of Zakat in Achieving Economic Empowerment, Environmental Sustainability, and Social Re-Engineering as Promoted in the 12th Malaysia Plan. In *Handbook of Research on Islamic Social Finance and Economic Recovery After a Global Health Crisis* (pp. 30–46). IGI Global. <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-6811-8.ch003>
- Marston, C., Renedo, A., & Miles, S. (2020). Community Participation is Crucial in a Pandemic. *The Lancet*, 395(10238), 1676–1678. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(20\)31054-0](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)31054-0)
- Miao, Q., Schwarz, S., & Schwarz, G. (2021). Responding to COVID-19: Community Volunteerism and Coproduction in China. *World Development*, 137, 105128. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105128>
- Moon, M. J. (2020). Fighting COVID-19 with Agility, Transparency, and Participation: Wicked Policy Problems and New Governance Challenges. *Public Administration Review*, 80(4), 651–656. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/puar.13214>
- Mujaddid, A., & Ramadan, G. R. (2019). Faktor Religiusitas dalam Membayar Pajak & Zakat. *InFestasi: Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 15(2), 98–110.
- Mujib, M., & Nurvianti, M. A. (2022). Komunikasi Pemasaran Terpadu Dalam Meningkatkan Dana ZIS Pada Lembaga Aamil Zakat Di Era Covid-19. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(2), 432–447. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.683>
- Newbold, S. C., Finnoff, D., Thunström, L., Ashworth, M., & Shogren, J. F. (2020). Effects of Physical Distancing to Control COVID-19 on Public Health, the Economy, and the Environment. *Environmental and Resource Economics*, 76(4), 705–729. <https://doi.org/10.1007/s10640-020-00440-1>
- Nugroho, Y., & Syarief, S. S. (2021). Grave Failures in Policy and Communication in Indonesia during the COVID-19 Pandemic. *ISEAS Perspective*, 113, 1–13.
- Olivia, S., Gibson, J., & Nasrudin, R. (2020). Indonesia in the Time of COVID-19.

- Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(2), 143–174. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1798581>
- Papaioannou, K. J. (2017). “Hunger Makes a Thief of any Man”: Poverty and Crime in British Colonial Asia. *European Review of Economic History*, 21(1), 1–28. <https://doi.org/10.1093/ereh/hew019>
- Power, M., Doherty, B., Pybus, K. J., & Pickett, K. E. (2020). How COVID-19 has Exposed Inequalities in the UK Food System: The Case of UK Food and Poverty. *Emerald Open Research*, 2(11). <https://doi.org/10.35241/emeraldopenres.13539.2>
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Nasional 2020*. <https://www.puskasbaznas.com/publications/books/1113-outlook-zakat-indonesia-2020>
- Rassanjani, S., Harakan, A., Pintobtang, P., & Jermsttiparsert, K. (2019). Social Protection System to Reduce Poverty in a Natural Resource-Rich Country: Towards the Success of the Sustainable Development Goals. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 7(8), 104–126. https://www.ijicc.net/images/vol7iss8/7803_Rassanjani_2019_E_R1.pdf
- Rassanjani, S., Nivada, A., Indriasari, R., & Ahmady, I. (2022). Non-Pharmaceutical Intervention Policies in Overcoming COVID-19 in Aceh: A Cross-Sectional Online Survey. *Journal of Government and Civil Society*, 6(1), 104–120. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v6i1.5618>
- Rassanjani, S., Risky, N., Maz, D., Alqarni, W., & Tharis, M. A. (2021). Impact of COVID-19 on Economic Activities and Poverty Threats in the Asia-Pacific Region. *Policy & Governance Review*, 5(1), 82–96. <https://doi.org/10.30589/pgr.v5i1.353>
- Razak, S. H. A. (2020). Zakat and Waqf as Instrument of Islamic Wealth in Poverty Alleviation and Redistribution: Case of Malaysia. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 40(3/4), 249–266. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-11-2018-0208>
- Rusyhdiana, A. S., & As-Salafiyah, A. (2021). A Scientometric Analysis of Zakat Literature Published in times of COVID-19 Pandemic. *International Journal of Zakat*, 6(2), 1–14. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i2.306>
- Sakanko, M. A., & David, J. (2018). Assessment of the Millennium Development Goals (MDGs) on the Eradication of Poverty and Hunger in Nigeria. *International Journal of Research in Arts and Social Sciences*, 11(2), 257–268. https://www.researchgate.net/publication/333786826_Assessment_of_The_Millennium_Development_Goals_MDGs_on_the_Eradication_Of_Poverty_And_Hunger_In_Nigeria
- Shaikh, S. A. (2016). Zakat Collectible in OIC Countries for Poverty Alleviation: A Primer on Empirical Estimation. *International Journal of Zakat*, 1(1), 17–35.
- Shaukat, B., & Zhu, Q. (2021). Finance and Growth: Particular Role of Zakat to Levitate Development in Transition Economies. *International Journal of Finance & Economics*, 26(1), 998–1017. <https://doi.org/https://doi.org/10.1002/ijfe.1832>
- Sparrow, R., Dartanto, T., & Hartwig, R. (2020). Indonesia Under the New Normal: Challenges and the Way Ahead. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(3), 269–299. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1854079>
- Suci, S. C., & Ramdansyah, A. D. (2019). Economic, Social and Political Openness on Unemployment in ASEAN. *Journal of Economics and Business*, 2(4), 1312–1320. <https://doi.org/10.31014/aior.1992.02.04.170>
- Swandaru, R., & Abdel Mohsin, M. I. (2022). Role of Zakat in Responding to COVID-19 Pandemic: Lessons Learnt and Way Forward. In M. K. Hassan, A. Muneeza, & A. M. Sarea (Eds.), *Towards a Post-Covid Global Financial System* (pp. 185–200). Emerald Publishing Limited.

<https://doi.org/10.1108/978-1-80071-625-420210010>

The World Bank. (2020). *Social Protection and Jobs Responses to COVID-19: A Real-Time Review of Country Measures*. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33635>

Ulfa, K., & Safirussalim, S. (2021). Implementation of the Curfew as a Policy of the Aceh Government on Handling COVID-19: A Social Responsibility. *Journal of Governance and Social Policy*, 2(2), 96–111. <https://doi.org/10.24815/gaspol.v2i2.22714>

Umar, U. H., & Abubakar, M. (2021). Maximizing Zakat Revenues in the COVID-19 Period : The Need for Creating Zakat Accounting Standards in OIC Member Countries. *International Journal of Zakat*, 6(2), 63–74. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i2.289>

Villa, S., Lombardi, A., Mangioni, D., Bozzi, G., Bandera, A., Gori, A., & Raviglione, M. C. (2020). The COVID-19 Pandemic Preparedness or Lack Thereof: from China to Italy. *Global Health & Medicine*, 6, 1–5. <https://doi.org/10.35772/ghm.2020.01016>

Wong, C. K. H., Wong, J. Y. H., Tang, E. H. M., Au, C. H., Lau, K. T. K., & Wai, A. K. C. (2020). Impact of National Containment Measures on Decelerating the Increase in Daily New Cases of COVID-19 in 54 Countries and 4 Epicenters of the Pandemic: Comparative Observational Study. *Journal of Medical Internet Research*, 22(7), e19904. <https://doi.org/10.2196/19904>